

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Dini Dwi Ermawati ¹, Fani Yulia Rosyada ²

Prodi Akuntansi, Universitas Gunadarma

Article History

Received : 26-Desember-2023

Revised : 28-Desember-2023

Accepted : 03-Januari-2024

Published : 03-Januari-2024

Corresponding author*:

Dini Dwi Ermawati

Contact:

dinidwi@staff.gunadarma.ac.id

Cite This Article:

Hendayana, Y. ., Puspasari, A. ., Fitriyani, N. ., & Nabilla, N. . (2024). PERAN PROMOSI PENJUALAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DI MARACA BOOKS AND COFFEE. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(01), 102-108.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1139>

Abstract: Motor vehicle tax is one source of government funds that has great potential in increasing regional revenues where the main capital of transportation for all economic activities. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and contribution of Motor Vehicle Tax to the original income of the DKI Jakarta area for the 2019-2022 period. The type of data used in this study is quantitative data. Analytical techniques are descriptive quantitative. The results showed that the average effectiveness of Motor Vehicle Name Reverse Duty in 2019-2022 was 100.40%, which means that Motor Vehicle Tax revenue is quite effective. Motor Vehicle Tax contributions for 2019-2022 obtained an average contribution rate of 20.44% so that they are included in the criteria for contributing to the original revenue of DKI Jakarta province.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax and Local Original Revenue

Abstrak: Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber dana pemerintahan yang sangat berpotensi dalam meningkatkan penerimaan daerah dimana modal utama perhubungan untuk segala kegiatan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2019-2022. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik analisis berupa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2019-2022 sebesar 100,40% yang artinya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup efektif. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2022 memperoleh rata-rata tingkat kontribusi sebesar 20,44% sehingga termasuk dalam kriteria sedang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan di Indonesia adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran - pengeluaran negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu sumber dari pendanaan pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Penggunaan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat dan menambah keuntungan bagi Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seno dan Restiyana (2018) mengatakan Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun sebaliknya jika semakin sedikit Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, semakin rendah kualitas otonominya. Berdasarkan buku Statistik Transportasi Darat, transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Zaman sekarang jumlah kendaraan sudah semakin berkembang di setiap daerahnya, terutama di daerah DKI Jakarta yang mana Jakarta merupakan ibukota negara. Dari sistem pembagian administrasi Indonesia, Jakarta adalah provinsi dengan status daerah khusus.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit)

Jenis Kendaraan	2019	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	3.310.426	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Bus	34.905	35.266	36.339	37.180
Truk	669.724	679.708	713.059	748.395
Sepeda Motor	15.868.191	16.141.380	16.711.638	17.304.447
Jumlah	19.883.246	20.221.821	21.005.527	21.856.081

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tabel 1 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat pada tiap tahunnya. Kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap bahwa kendaraan pribadi jauh lebih efektif dan efisien waktu dibandingkan dengan kendaraan umum. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya juga didorong oleh meningkatnya pendapatan yang menyebabkan tingkat daya beli dan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor ikut meningkat. Meningkatnya kendaraan bermotor tentu diikuti oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dibuktikan melalui kebijakan fiskal regional Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2021. Pada kebijakan tersebut menunjukkan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kontribusi sebesar 83,30% dari total penerimaan PAD, dan berkontribusi 52,23% terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nilai realisasi terbesar dari komponen pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp4,14 triliun atau 34,34% dari realisasi pajak daerah.

Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (M. Paramitha and S. Piola: 2022). Kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang iuran, namun dalam pajak kontribusi adalah sumbangan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Kontribusi ini digunakan untuk menentukan besarnya sumbangan yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (N. Karina., N. Budiarmo:2016). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Analisis seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini dilakukan dengan menilai tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019- 2021

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis penelitian ini digunakan untuk menentukan besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta yang akan dihitung dengan menggunakan rumus.

Analisis Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019) perhitungan rasio efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerahnya tersebut. Rasio efektivitas dapat dikatakan efektif jika persentase rasio mencapai 100%. Perhitungan tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas dapat diklasifikasikan ke dalam kriteria seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan yang ditargetkan.

Analisis Kontribusi

Menurut Mahmudi (2019), rasio kontribusi dapat dihitung dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan PAD. Perhitungan tingkat kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

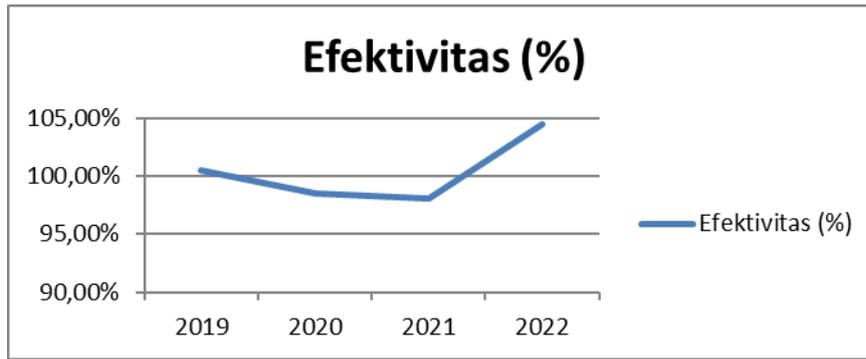
Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Target	Rp 8.800.000.000.000	Rp 8.000.000.000.000	Rp 8.800.000.000.000	Rp 9.000.000.000.000
Realisasi	Rp 8.844.155.231.721	Rp 7.879.175.181.468	Rp 8.634.664.519.292	Rp 9.404.927.298.262
Efektivitas (%)	100,50%	98,49%	98,12%	104,50%
Kriteria	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif

Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 2,01%. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2020 mencapai Rp 7.879.175.181.468,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp 8.844.155.231.721,00. Terjadi penurunan sebesar 10,91% atau Rp 964.980.050.253,00. Hal ini dikarenakan munculnya wabah Covid-19 di Indonesia sehingga perekonomian masyarakat menurun secara keseluruhan dan penerapan tarif progresif yang belum optimal.

Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,37%. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.634.664.519.292,00 atau 98,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.800.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 tidak mencapai target sebesar Rp165.335.480.708,00 atau 1,88%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp755.489.337.824,00 atau 9,59% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebesar Rp7.879.175.181.468,00.

Pada tahun 2021 ke 2022 terdapat kenaikan sebesar 6,38%. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 adalah sebesar Rp9.404.927.298.262,00 atau 104,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 telah melampaui target sebesar Rp404.927.298.262,00 atau 4,50%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp770.262.778.970,00 atau 8,92% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sebesar Rp8.634.664.519.292,00.



Grafik 1. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

Berdasarkan data pada Grafik 1 dapat dilihat rata-rata efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2022 sebesar 100,40% dengan kriteria sangat efektif. Walaupun kriteria sangat efektif karena realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, yaitu: a. pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif dirasakan belum optimal, dikarenakan samsat belum memiliki akses secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Terdapat modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pengajuan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor; c. Masyarakat masih berdampak bencana wabah Covid 19 sehingga perekonomian dapat dikatakan belum stabil.

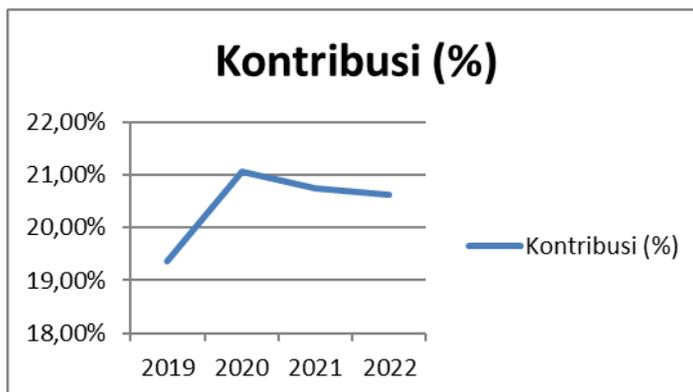
Pada tahun 2019, efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam kriteria sangat efektif jika dilihat dari tingkat efektivitasnya yang sebesar 100,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Pemerintah DKI Jakarta sudah optimal dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat efektivitas di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2019, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan tingkat. Namun pada tahun 2022 Pajak Kendaraan Bermotor meningkat sebesar 104,50% dengan kriteria efektif sehingga dapat dikatakan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat mengelola Pajak Kendaraan Bermotor walaupun masih banyak masyarakat terdampak Pandemi Covid 19.

Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 6. Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Realisasi PAD	Rp 45.707.400.003.802	Rp 37.414.754.711.193	Rp 41.606.307.405.630	Rp 45.608.404.729.501
Realisasi PKB	Rp 8.844.155.231.721	Rp 7.879.175.181.468	Rp 8.634.664.519.292	Rp 9.404.927.298.262
Kontribusi (%)	19,35%	21,06%	20,75%	20,62%
Kriteria	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang

Tabel 6 menjelaskan bahwa tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1,71% sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,44% dari tahun 2020. Rata-rata yang diperoleh dari kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2022 adalah sebesar 20,44% dengan kriteria sedang. Tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019- 2022 dapat disajikan dalam bentuk Grafik 2 berikut:



Grafik 2. Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022

Berdasarkan Grafik 2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2022 termasuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 20,44%. Tahun 2019, realisasi penerimaan PKB masuk dalam kriteria kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta karena tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 hanya mencapai 19,35%. Sedangkan, untuk tahun 2020 tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 21,06% dan untuk tahun 2021 sebesar 20,75%, dan tahun 2022 sebesar 20,65%. Tingkat kontribusi tahun 2020 sampai 2022 tersebut dalam kriteria sedang.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar 100,40% memiliki kriteria sangat efektif sehingga dapat dikatakan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat mengelola Pajak Kendaraan Bermotor walaupun masih banyak masyarakat terdampak Pandemi Covid 19.

Tingkat kontribusi dalam realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019- 2022 sebesar 20,44% termasuk dalam kriteria sedang. Walaupun sangat efektif namun kontribusi masih dalam kriteria sedang artinya Pajak Kendaraan Bermotor masih belum optimal dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah dan penggalan potensi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kendala tersebut seperti: a. pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif dirasakan belum optimal, dikarenakan samsat belum memiliki akses secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Terdapat modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pengajuan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor; c. Masyarakat masih berdampak bencana wabah Covid 19 sehingga perekonomian dapat dikatakan belum stabil.

Saran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memaksimalkan realisasi penerimaan pajak agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah DKI Jakarta juga diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan kebijakan yang sudah diterapkan seperti razia gabungan terhadap kendaraan bermotor belum daftar ulang (KBm BDU) dan memberikan sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media online

Masyarakat yang selaku Wajib Pajak, disarankan untuk mengikuti pengarah dan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui media massa dan media online.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

- [2] Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [3] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- [4] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- [8] <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- [9] https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw3_2021/9_DKI_Jakarta-min.pdf
- [10] PPIID DKI Jakarta. 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/assets/pdf/lkpd2019.pdf>
- [11] PPIID DKI Jakarta. 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2020>
- [12] PPIID DKI Jakarta. 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2020>
- [13] S. Resmi. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017, 125 – 150.
- [14] A. Onibala, T. O. Rotinsulu, I. Pingkan, and F. Rorong, “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,” 2021
- [15] M. As Sahara, D. A. Hermarani and N. Indriaty “ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI KEPUALUAN RIAU PADA PANDEMI COVID 19,” *JURNAL INOVASI PENELITIAN*, vol. 3, pp. 6433–6443, Oct. 2022.
- [16] M. Paramitha and S. Piola, “AKASYAH-Journal of Islamic Accounting Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” 2022.
- [17] N. Karina and N. Budiarmo “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO,” *JURNAL EMBA*, vol. 4, no. 1, pp. 715–722, Mar. 2016.
- [18] R. Fitriya, “Halaman 405-411 ol.x, No.x,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 4, no. 3, p. 1, 2019.
- [19] T. Fristyia, “ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN SUNSET POLICY TO THE ENHANCEMENT OF MOTOR VEHICLE TAX REVENUES (Study on the Technical Executing Unit of Local Revenue Offices of East Java Province; North Malang and Batu City)”.